

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternative Pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/02/Bapp Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Renja OPD Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya menjabarkan dan menguraikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang langsung dilaksanakan dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahapan kedua untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu RKPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk Tahun yang sama.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2013-2018 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*) serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals (MDGs)*. Tantangan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 44.257.000 pada Tahun 2011, adapun untuk Tahun 2014 jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 46.029.600 jiwa, total penduduk Jawa Barat sebesar 18,24% dari total penduduk Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66%. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan.

Disadari bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa barat dalam pemenuhan pangan harus berjalan optimal dan berhasil guna, maka optimalisasi sumber daya manusia (*man*), keuangan (*money*), peralatan dan sarana prasarana (*machine*) serta pengorganisasian (*manajemen*) menjadi kebutuhan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Atas pertimbangan tersebut di atas, penyusunan RK-OPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah harus mempertimbangkan seluruh potensi yang ada, terutama pada aspek yang bersifat khusus dan mendesak. Untuk itu, penetapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan harus jelas dan terukur.

Keterlibatan Kabupaten/Kota dalam hal ini Badan/Dinas/Lembaga yang menangani Bidang Ketahanan Pangan melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Parsipatif maupun Forum OPD juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RK-SKPD Badan. Hal ini tidak

lain dalam rangka percepatan dan efektifitas pencapaian program Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

- 
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No. 55);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
26. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E).
27. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/02/Bapp Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Renja OPD Provinsi Jawa Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan arah dan kebijaksanaan operasional serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016.
2. Menetapkan indikatif anggaran yang direncanakan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN Tahun Anggaran 2016.
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan antar instansi dan lembaga yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
4. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2016 secara lebih efektif dan efisien, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target dan sasaran sebagaimana yang telah diprogramkan dalam Tahun 2016.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Tersedianya arahan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016, sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan kendala, permasalahan dan tantangan yang perlu diselesaikan pada Tahun 2016;



2. Terwujudnya gambaran kegiatan pokok penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan TA. 2016 dan terpantaunya alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN Tahun 2016;
3. Terwujudnya pelaksanaan program kegiatan Badan Ketahanan Pangan yang tepat sasaran dan tepat waktu;
4. Terwujudnya pedoman evaluasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di Badan Ketahanan Pangan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 5 (lima) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Tahun Lalu.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu.
- 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **Bab IV Penutup**





## **BAB. II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

---

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014**

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Tahun-Tahun yang lalu adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap

sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi dana kegiatan dalam kelompok Belanja Langsung adalah sebesar Rp.15.286.458.091,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.120.272.182,-, sehingga jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 23.406.730.271,-, yang dijabarkan kedalam 8 (delapan) program pembangunan dan 18 (delapan belas) kegiatan. Adapun rincian program/kegiatan dan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

**A. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.032.950,-

Badan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Ketahanan Pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan/bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada masa mendatang, maka pada Tahun 2014 telah disusun Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ketentuan menyusun renstra bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

1. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pokok dan Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.595.520.104.-

Dalam penyediaan cadangan pangan pokok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun 2009 sebesar 545,45 ton, Tahun 2012 sebesar 258 ton, dan Tahun 2013 sebesar 206,4 ton, dan pengadaan Tahun 2014 sebesar 206.400 kg, sehingga jumlah CPP selama 2009-2014 sebanyak 1.216, 2 ton. Sampai dengan Tahun 2014 dari jumlah tersebut telah di salurkan sebanyak 714,3 ton dalam 73 kali penyaluran untuk mengatasi potensi kerawanan pangan 207.392 jiwa korban pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat, sehingga stok CPPD sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 501,92 ton atau 418.25 % dari capaian SPM Tahun 2016.

Disamping upaya penguatan cadangan pangan pokok daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berusaha meningkatkan cadangan pangan pokok masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Tahun 2009 telah salurkan bantuan sosial uang untuk mengisi 138 Lumbung Pangan Masyarakat setara 394 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Tahun 2011 dibangun 149 unit lumbung yang menyediakan cadangan GKG sejumlah 745 Ton, Tahun 2012 dibangun 149 unit yang menyediakan cadangan GKG sejumlah 662 Ton, dan Tahun 2013 dibangun 363 unit yang menyediakan cadangan GKG sejumlah 2.269 Ton. Dan Tahun 2014 dibangun 454 unit yang menyediakan 2.724 ton. Sehingga jumlah cadangan pangan GKG masyarakat mencapai 6.794 Ton.

2. Kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 490.666.000,-

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem dari sistem ketahanan pangan, dengan tujuan untuk mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien, sehingga seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Dalam memperoleh bahan pangan yang cukup tersebut, berkaitan erat dengan aspek kuantitas dan kualitas pangan baik secara fisik maupun secara ekonomis, yang kesemuanya dapat diinterpretasikan melalui harga. Selain itu naik turunnya harga bahan pangan merupakan sinyal pemerataan dan daya jangkau masyarakat terhadap pangan. Oleh karena itu harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Kondisi pada saat ini dalam aspek distribusi dan harga pangan, masih ditemui berbagai permasalahan pokok yang perlu dipecahkan antara lain belum efektif dan efisiensinya mekanisme distribusi untuk beberapa komoditi pangan pokok seperti beras, kedelai, dan sebagainya. Dengan pola produksi musiman, maka terjadi fluktuasi harga (beras) dimana pada saat panen raya harga cenderung turun, sebaliknya pada saat pasokan berkurang (paceklik) harga cenderung meningkat sehingga memberatkan konsumen.

Untuk stabilisasi harga terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan akses pangan masyarakat yang meliputi : pemantauan harga dan distribusi bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen dan tingkat konsumen sebagai bahan evaluasi kondisi harga pangan sebagai dampak kebijakan pemerintah misalnya karena adanya kenaikan harga BBM, krisis, operasi pasar, kebijakan ekspor/impor, subsidi harga, bea masuk dan lain-lain.

Untuk mengimplementasikan bidang distribusi dan harga pangan, diperlukan instrumen variabel operasional yang secara obyektif mampu memvisualisasikan atau memperagakan data-data terkait bidang distribusi dan harga pangan. Ketelitian menyusun dan mengukur variabel tersebut, akan memudahkan dalam memberikan bahan dan konsep kebijakan yang terkait dengan baik perbaikan kondisi yang ada atau dalam skala luasnya menyusun strategi pencapaian mewujudkan ketahanan yang mapan di masa mendatang.

3. Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.992.110.000,-

Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi serta menerapkan perilaku sadar gizi yang baik untuk anggota keluarganya. Perilaku sadar gizi adalah pengetahuan, sikap dan praktek keluarga untuk mewujudkan keadaan gizi yang baik meliputi menimbang berat badan secara teratur, mengonsumsi makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat

Makanan seimbang adalah susunan makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah aman atau bebas dari bahan tambahan zat berbahaya seperti zat pengawet dan pemanis buatan, pestisida, makanan yang telah kadaluarsa atau makanan basi (sudah berubah warna, berbau dan berlendir).

Keadaan gizi dapat dipengaruhi oleh keadaan fisiologis, dan juga oleh keadaan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Pada saat ini, selain dampak dari krisis ekonomi yang masih terasa, juga keadaan dampak dari bencana nasional mempengaruhi status kesehatan pada umumnya dan status gizi khususnya.

Pemantauan Status Gizi sebagai salah satu komponen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) mengkategorikan ada 30% Kabupaten di seluruh Indonesia yang termasuk klasifikasi daerah rawan tinggi (110 Kabupaten) dan 18% Kabupaten termasuk dalam klasifikasi daerah rawan sedang (67 Kabupaten).

Klasifikasi ini dibuat berdasarkan indikator kesehatan (% status gizi), sosial ekonomi (% KK miskin) dan indikator pertanian (ketersediaan pangan).

Ada dua Kabupaten yang masuk dalam kategori daerah rawan gizi di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung. Satu Kabupaten termasuk kategori daerah rawan gizi sedang, yaitu Kabupaten Karawang.

Masalah kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada dasarnya masih tertumpu kepada permasalahan tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Gizi Buruk, serta tingginya penyakit Infeksi/penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, DBD dan Filariasis. Angka prevalensi gizi buruk di Jawa Barat sebesar 3.7%, gizi sedang 11.3%, gizi baik 81.5% dan 3.5% obesitas (Riskesdas, 2007). Angka kematian bayi di Jawa Barat adalah 39/1000 kelahiran hidup, rata-rata bayi yang mendapat ASI eksklusif 1,2 bulan, anak yang mendapatkan suplemen vit A sebesar 74,5% dan ibu hamil yang mendapatkan suplemen zat besi sebesar 28% (SDKI, 2007).

Keluarga merupakan basis utama dari sumber permasalahan gizi di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut antara lain adalah tingkat kemampuan keluarga dalam menyediakan pangan sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga, pengetahuan dan perilaku keluarga dalam memilih, mengolah, dan membagi makanan di tingkat rumah tangga, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar, serta ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat yang berkualitas. Namun, selain basis utama dalam keluarga, lingkungan juga memiliki peranan yang tak kalah pentingnya.

Program LINGBASRANGAN merupakan integrasi antara membangun kekuatan dalam keluarga sebagai basis utama dalam permasalahan gizi serta kesadaran masyarakat yang akan membangun lingkungan yang dapat mengantisipasi permasalahan gizi dalam masyarakat. Dengan program ini diharapkan agar setiap keluarga mampu mengenal, mencegah dan masalah gizi setiap anggota keluarga serta terwujud lingkungan yang mendukung terciptanya Keluarga Sadar Gizi.



Program ini dilakukan dengan menggerakkan peran serta masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa. Upaya untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat merupakan bagian dari kerja Tim Penggerak (TP) PKK. Sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah di mana pengelolaannya dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maka, TP PKK berpotensi menjalankan kegiatan LINGBASRANGAN menuju Jawa Barat yang bebas daerah rawan pangan agar keluarga dapat hidup mandiri, dinamis, dan sejahtera.

4. Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dibentuk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan regional di Jawa Barat. Untuk mempercepat terwujudnya hal tersebut, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dibantu oleh Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota berkedudukan di Badan/Dinas/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan, yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKP, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, dapat mengundang Bupati/Walikota melalui Rapat Koordinasi DKP Provinsi dan DKP Kabupaten/Kota dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat serta mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan ketahanan pangan yang tangguh di Jawa Barat.



5. Kegiatan Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga pemenuhannya bagi seluruh masyarakat harus selalu terjamin setiap waktu di setiap wilayah/daerah. Dalam perkembangannya peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri dalam suasana tentram serta sejahtera lahir dan batin, semakin menuntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan, pengaturan, pembinaan, penyediaan dan pengawasan. Sedangkan masyarakat mempunyai peranan sebagai penyelenggara usaha-usaha penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan, sehingga perwujudan ketahanan pangan tersebut akan mudah dilaksanakan apabila antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat dapat membangun kerjasama yang sinergis.

6. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 796.830.000,-

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga khususnya Rumah Tangga Miskin, perlu suatu upaya memberdayakan masyarakat miskin, yang salah satunya melalui Kegiatan Optimalisasi Lahan Pekarangan.

Dalam mengelola pekarangan, beragam fungsi dasar pekarangan termaksimalkan yaitu menjadi warung hidup, bank hidup, apotik hidup serta fungsi keindahan. Lahan pekarangan yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat antara lain adanya peningkatan gizi keluarga lingkungan rumah asri, teratur, indah dan nyaman. Semakin beragam tanaman pangan atau tanaman obat keluarga (toga) yang dikembangkan serta semakin banyak ternak/ikan yang dibudidayakan maka diharapkan rumah tangga/keluarga yang mengelola, kehidupannya akan menjadi

semakin sejahtera. Selain itu manfaat yang kita peroleh dari pekarangan dan tentunya secara ekonomi merupakan salah satu sumber pendapatan keluarga.

Untuk itu Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan cara Fasilitasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Intensifikasi Lahan Pekarangan di Kab. Subang, Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Garut dan Kuningan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan dan pola tanam.

7. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.996.382.500.000,-

Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan, dengan karakteristik: kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumber daya modal terbatas, akses teknologi rendah, dan infrastruktur perdesaan terbatas. Komponen kegiatan Demapan meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelembagaan; (3) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan (4) integrasi program dan kegiatan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan; pendampingan; dan peningkatan akses untuk pengembangan: kerjasama partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat, sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan.

Adapun untuk pelaksanaan Desa Mapan yang bersumber dari dana APBD dibagi dalam tiga (3) tahapan, yaitu Tahun pertama *tahapan* penumbuhan (gabungan persiapan dan penumbuhan), Tahun *kedua* adalah tahapan pengembangan dan Tahun *ketiga* adalah tahapan kemandirian. Pada Tahun keempat Desa dimaksud

harus sudah memasuki *exit strategi* yang tidak perlu lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat, dan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi spesifik lokasi sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya. Untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa, diperlukan dukungan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan.

8. Kegiatan Pemantauan Distribusi, Harga dan Akses Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem dari sistem ketahanan pangan, dengan tujuan untuk mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien, sehingga seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Dalam memperoleh bahan pangan yang cukup tersebut, berkaitan erat dengan aspek kuantitas dan kualitas pangan baik secara fisik maupun secara ekonomis, yang kesemuanya dapat diinterpretasikan melalui harga. Selain itu naik turunnya harga bahan pangan merupakan sinyal pemerataan dan daya jangkauan masyarakat terhadap pangan. Oleh karena itu harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Kondisi pada saat ini dalam aspek distribusi dan harga pangan, masih ditemui berbagai permasalahan pokok yang perlu dipecahkan antara lain belum efektif dan efisiensinya mekanisme distribusi untuk beberapa komoditi pangan pokok seperti beras, kedelai, dan sebagainya. Dengan pola produksi musiman, maka terjadi fluktuasi harga (beras) dimana pada saat panen raya harga cenderung turun, sebaliknya pada saat pasokan berkurang (paceklik) harga cenderung meningkat sehingga memberatkan konsumen.

Untuk stabilisasi harga terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan akses pangan masyarakat yang meliputi : pemantauan harga dan distribusi bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen dan tingkat konsumen sebagai bahan evaluasi kondisi harga pangan sebagai dampak kebijakan pemerintah misalnya karena adanya kenaikan harga BBM, krisis, operasi pasar, kebijakan ekspor/impor, subsidi harga, bea masuk dan lain-lain.

Untuk mengimplementasikan bidang distribusi dan harga pangan, diperlukan instrumen variabel operasional yang secara obyektif mampu memvisualisasikan atau memperagakan data-data terkait bidang distribusi dan harga pangan. Ketelitian menyusun dan mengukur variabel tersebut, akan memudahkan dalam memberikan bahan dan konsep kebijakan yang terkait dengan baik perbaikan kondisi yang ada atau dalam skala luasnya menyusun strategi pencapaian mewujudkan ketahanan pangan yang mapan di masa mendatang.

9. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.044.862,-

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO 2000) menginformasikan bahwa lebih dari 90 persen masalah kesehatan manusia terkait dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Faktor penentu mutu makanan adalah keragaman jenis pangan, keseimbangan gizi, dan keamanan pangannya. Ketidak seimbangan gizi akan membawa dampak pada munculnya masalah gizi kurang dan gizi lebih. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan beranekaragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi pada jenis makanan yang lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang.

Menyadari hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia sejak Tahun 60-an telah merintis upaya perbaikan kualitas makanan dan gizi keluarga, melalui berbagai

program atau kegiatan perbaikan menu makanan rakyat. Upaya tersebut diawali dengan pelaksanaan *Applied Nutrition Program* (ANP) yang merupakan cikal bakal program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Kemudian sejak Tahun 1990, di Departemen Pertanian, untuk memperbaiki gizi dan peningkatan pendapatan keluarga miskin terutama di pedesaan, telah melaksanakan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) yang kegiatan utamanya pemanfaatan pekarangan, kebun sekolah dan Gerakan Sadar Pangan dan Gizi (GSPG) melalui metoda TOT dan sekolah lapang.

Implementasi kebijakan ini berlangsung lambat karena masalah kelembagaan, manajemen, sumberdaya dan peran pemerintah lebih dominan. Sampai saat ini belum ada gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara itu, pada era otonomi ini diperlukan suatu rambu-rambu program dan gerakan, agar berbagai program dan percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) di berbagai daerah dapat bersinergi dengan program-program lain secara nasional. Untuk itu perlu adanya Pedoman Umum Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi.

Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Penganeekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Atas dasar pemikiran tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, adapun

sasaran ingin dicapai adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2013-2018 adalah Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

10. Kegiatan Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.440.000,-

Seperti diketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap orang dimana harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Bahan pangan berguna untuk membangun sel – sel tubuh dan menjaga agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang serta mampu beraktivitas dan memelihara kondisi tubuh, akan tetapi makanan yang kita makan sehari – hari mempunyai resiko menjadi tidak aman untuk dikonsumsi.

Diantara beberapa sumber bahan pangan terdapat perbedaan yang cukup nyata dalam hal resiko keamanannya. Resiko bahaya dari bahan pangan atau makanan sangat beragam tergantung antara lain pada jenis dan tempat diperolehnya, serta peka tidaknya bahan makanan tersebut terhadap kerusakan.



Keamanan pangan bersifat dinamis dan berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Ketika kecukupan pangan (*food security*) belum tercapai, apresiasi terhadap keamanan pangan relatif rendah. Sebaliknya saat persediaan pangan melimpah, apresiasi terhadap keamanan pangan relatif amat tinggi. Maka tak perlu heran, bila masyarakat di negara-negara maju-secara ekonomi sudah makmur dan penghargaan terhadap kesehatan tinggi-menerapkan persyaratan keamanan pangan pada prioritas pertama. Mereka dalam memilih makanan, tidak lagi semata pada harga, gizi, dan kelezatan, tetapi aman tidaknya terhadap kesehatan tubuh menjadi prioritas utama.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPD Provinsi Jawa Barat) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.22/2008 dengan tujuan Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan Segar yang bersumber dari hewani dan nabati dan juga untuk meningkatkan daya saing produk Jawa Barat di pasar domestik maupun internasional

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Segar Hasil Pertanian.

OKKP-D berfungsi memberikan sertifikat/ penggunaan tanda label kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu berdasarkan GAP (Prima 2 dan 3), (GHP/GMP) dan meregister produk pangan segar yang beredar.

OKKP-D Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 501/Kep.236-BKPD/2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

OKKP-D bertujuan menjamin mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian, dan meningkatkan efektifitas Pengawasan Mutu Pangan Segar Hasil Pertanian.



**C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 278.075.700,-

**D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.472.050.675,-

**E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.082.484.500,-

**F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKPD Jabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.229.270.800,-

**G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

**H. Program Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah**

Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.550.000,-

Adapun tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah dan  
Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2014  
Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2013 s.d 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja OPD Tahun 2014	Realisasi Renja OPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	Urusan Wajib										
1 21	Urusan Wajib Ketahanan Pangan										
1 21 29 01	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah										
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Persentase sinergitas perencanaan pembangunan daerah	90	70	70	70	1	75	70	0.78	
1 21 45	Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
	Lingkungan bebas rawan pangan	Jumlah sasaran (balita, bumil, ibu menyusui) di daerah rawan pangan	880	170	180	180	1.00	160	510	0.58	
	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	- Konsumsi energi k.kal/kap/hari	2150	1996	1900	2010.9	1.06	2000	2000	0.93	
		- Konsumsi protein gram/kap/hari	56	56.9	54	58.5	1.08	55	55	0.98	
		- Penurunan konsumsi beras	82	88.9	90	86.71	0.96	88	88		
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat	Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumen	82	74.9	72	78.3	1.09	76	76	0.93	
	Lomba Cipta Menu berbasis pangan local di Jawa Barat	Persentase penyelenggaraan lomba cipta menu	100	0	0	0	0.00	100	100	1.00	
	Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)	Terfasilitasinya sertifikasi Prima 3	90	90	85	90	1.06	90	90	1.00	
	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Daerah Aliran	Jumlah Kelompok KWT di Kab./Kota yang diberdayakan	610	0	10	10	1.00	150	160	0.26	
	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah desa rawan pangan	300	0	30	30	1.00	60	90	0.30	
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tingkat situasi pangan dan gizi (SKPG)	100	0	0	0	0.00	100	100	1.00	
	Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan	Jumlah keluarga miskin yg diberdayakan	63	6	6	6	1.00	12	24	0.38	
	Analisis ketersediaan pangan di Jawa	Skor pola pangan harapan tingkat	93	88.6	89	84.6	0.95	90	90	0.97	
	Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat	2400	363	500	454	0.91	400	1217	0.51	
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah cadangan beras pemerintah	2000	206.4	400	206.4	0.52	400	812.8	0.41	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Harga	Persentase harga pangan pokok	100	100	100	100	1.00	100	100	1.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2013 s.d 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan			
					Target Renja OPD Tahun 2014	Realisasi Renja OPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah LDPM	519	0	64	64	1.00	80	144	0.28				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat	Jumlah LAPM	156	0	16	16	1.00	20	36	0.23				
	Dewan Ketahanan Pangan	- Persentase program/kegiatan yang	90	90	90	90	1.00	70	70	0.78				
		- Jumlah kompetensi SDM aparatur dalam mewujudkan ketahanan pangan	1740	180	180	180	1.00	300	660	0.38				
		- Jumlah dokumen kebijakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di	1	1	1	1	1.00	1	3	3.00				
	Pengembangan manajemen kelembagaan dan infrastruktur pangan	- Jumlah kompetensi SDM masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan	2550	50	50	50	1.00	250	350	0.14				
		- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan	22500	3000	3000	3000	1.00	4000	4000	0.18				

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Jawa Barat sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahanan pangan nasional.

Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di Bidang Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar berikut :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan indikator Penguatan cadangan pangan sebesar 60% pada Tahun 2016.
2. Distribusi dan Akses Pangan, dengan indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100% pada Tahun 2016.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, dengan indikator Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 80% pada Tahun 2016. Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada Tahun 2016.
4. Indikator Kinerja Penguatan Cadangan Pangan
  - a) Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

#### Definisi Operasional :

- Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
- Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

#### Definisi Operasional :

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;

#### *Target :*

Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2016.

#### b) Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Definisi Operasional :

Tersedianya data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/Tahunan.

*Target :*

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Provinsi 100 % pada Tahun 2016.

c) Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Definisi Operasional :

Tersedianya informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;

- Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
- Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

*Target :*

Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada Tahun 2016

d) Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan factor penyebabnya kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu Rawan Pangan Kronis dan Transien

Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
  - 2) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan Tahunan.
  - 3) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).



- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 Tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
- Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
  - a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
  - b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
  - c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

*Target :*

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada Tahun 2016.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja	Target SPM (2016)	Target OPD (2014)	Target Rensta OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Ratio Capaian (%) Tahun Ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Penguatan Cadangan Pangan (% dan ton)	60	125	110	110	120	120	125	272,2	232,2	170,9	217,1	-	247,5	211,1	142,4	180,9	-
2	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	66,7	66,7	66,7	66,7	-	66,7	66,7	66,7	66,7	-
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80	70	-	-	60	65	70	-	-	65,3	77,4	-	-	-	108,8	119,1	-
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	60	60	40	50	60	70	80	45,4	48,6	63,5	74,3	-	113,5	97,2	105,8	106,1	-

Realisasi capaian indikator kinerja Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 sebesar 418.25 %, (sebesar 501.92 Ton Beras). Realisasi capaian pada Indikator Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2016 berdasarkan SPM sebesar 60% atau sebesar 120 Ton beras dari total sebesar 200 ton beras (setara beras), telah terlampaui, dan tersisa sebesar 501.92 ton beras, yang tersimpan di Gudang BULOG. CPPD dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan transien maupun kerawanan pangan kronis di masyarakat.

Target Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan dengan target SPM dan target OPD sebesar 100%, pada Tahun 2012 baru mencapai 66,7% karena dari ketiga komponen Informasi tersebut, baru tersedia Informasi Pasokan dan Harga Pangan, sementara untuk Informasi akses pangan baru dilaksanakan pada Tahun 2013.

Indikator kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, karena Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa Barat baru dibentuk Tahun 2010, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat, yang berfungsi :

- Memberikan sertifikat kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu seperti Sertifikat Prima 2 dan Prima 3, GAP (Good Agricultural Practice), GHP (Good Handling Practice), GMP (Good Manufacturing Practice)
- Melakukan audit dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian dan melaporkannya ke OKKP-P
- Pelayanan registrasi produk pangan segar hasil pertanian
- Melakukan pengawasan pangan hasil pertanian pada pelaku usaha.

Jumlah sample pangan segar yang di Uji Laboratorium sampai dengan Tahun 2012 adalah sebanyak 115 sample, dan 89 sample diantaranya bebas residu pestisida dan bahan berbahaya lainnya serta memperoleh sertifikat Prima 2 dan Prima 3. Dengan demikian

capaian kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah sebesar 77,4 % dari target 70%, dengan rasio capaian sebesar 108,8% pada Tahun 2012.

Berdasarkan DDRT/SRT bahwa jumlah Desa Rawan Pangan di Jawa Barat adalah sebanyak 2.500 Desa. Sampai dengan Tahun 2012 jumlah Desa sudah diintervensi sebanyak 1.857 Desa, melalui Program Desa mandiri Pangan sebanyak 202 Desa, Lumbung Pangan 697 Desa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 778 Desa, dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) sebanyak 180 Desa. Dengan demikian capaian indikator penanganan daerah rawan pangan Tahun 2012 adalah sebesar 74,3 % lebih besar dibandingkan target yaitu 70%, dengan rasio capaian 106,1 %.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi, Ketahanan Pangan merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan, memiliki isu-isu penting yang harus diamanatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Lemahnya akses pangan masyarakat
2. Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Barat (skor PPH 70,2)
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor
4. Tingginya prosentase penduduk rawan pangan (13,02%)
5. Fluktuasi Harga
6. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras (94,33 Kg/kapita/Tahun)
7. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah
8. Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan

### **2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.**

Sesuai dengan PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 49 TAHUN 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana ditetapkan tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintah Daerah bidang ketahananpangan berdasarkan asas ekonomi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Berdasarkan identifikasi awal terhadap permasalahan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung kebijakan pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, pada beberapa OPD Kab./Kota di Jawa Barat yang menangani Bidang Ketahanan Pangan masih belum seluruhnya berbentuk Kantor/Badan.
2. Masih lemahnya mekanisme perencanaan yang partisipatif, sebagai pencerminan good government

3. Kurang optimalnya system dan mekanisme data dan informasi sebagai sumber bagi penyusunan rencana dan aktivitas pengendalian pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan.
4. Masih lemahnya tertib administrasi dalam aspek pembiayaan, kurangnya kuantitas dan kualitas penunjang kegiatan, serta personil yang memiliki kompetensi
5. Dokumen rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Bidang Ketahanan Pangan sebagai landasan konseptual dan operasional dalam mendukung kualitas pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan, dirasakan masih belum optimalnya dalam meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan.
6. Kurangnya data dan informasi yang up to date serta kontinyu sampai dengan desa dari produk-produk perencanaan Bidang Ketahanan Pangan yang dihasilkan oleh instansi terkait kepada masyarakat luas,
7. Sumberdaya pembangunan daerah yang begitu melimpah, masih belum dimanfaatkan secara optimal, sebagai akibat kurangnya kemampuan untuk menginventarisir potensi sumberdaya pembangunan
8. Masih lemahnya kemampuan dalam menyusun skenario kebijakan pembiayaan pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan.
9. Masih lemahnya koordinasi yang dibangun melalui jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan, untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan yang ada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembangunan di daerah khususnya Bidang Ketahanan Pangan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan dalam kontelasi pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan, maka

peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan Tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terukur.

### 2.3.2. Dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah

Dalam mewujudkan Visi Jawa Barat yaitu "Maju dan Sejahtera untuk Semua", Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke pertama dan kedua.

Misi pertama, **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**, salah satu sasarannya adalah Pemenuhan hak dasar manusia. Pemenuhan hak dasar manusia adalah hal mendasar yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Jawa Barat, karena pada hakekatnya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehidupan dasar dari warganya berlangsung dengan baik. Salah satu hak dasar tersebut adalah pemenuhan pangan yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Jawa Barat, yang diimplementasikan melalui program-program yang mendukung bagi terwujudnya **Jawa Barat Bebas Rawan Pangan**.

Misi ke dua, **Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**, salah satu sasarannya adalah memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional. Pembangunan ekonomi perdesaan mensyaratkan kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.



Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Jawa Barat yaitu “Maju dan Sejahtera untuk Semua”, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, maka Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 – 2018 adalah :

**“Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan  
yang Berkelanjutan“**

Arti dari visi tersebut adalah bahwa Badan Ketahanan Pangan berkeinginan menjadi institusi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas secara terus menerus setiap waktu diseluruh pelosok wilayah Jawa Barat.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor
- 2) Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, Berbasis Potensi Lokal
- 3) Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

Melalui Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut diimplementasikan dengan perencanaan ketahanan pangan melalui dokumen RPJP, RPJM, RKPD dan selanjutnya dituangkan kedalam kegiatan ketahanan pangan yang didanai dari APBN dan APBD Provinsi.

### **2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD**

Dalam upaya Mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman

eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama ketahanan pangan, yaitu: (1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan; (2) Distribusi dan Akses Pangan; dan (3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi yang sangat memadai; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; cakupan wilayah dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki; fasilitas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian stratejik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan; serta keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain: belum terpenuhinya *critical mass* kompetensi SDM di masing-masing Bidang; belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian mengenai Bidang Ketahanan Pangan; rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan ketahanan pangan yang akurat dan terkini; serta belum primanya pelayanan Badan Ketahanan Pangan kepada *stakeholders* dan masyarakat.

#### **2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2016**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, merupakan penjabaran pelaksanaan Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Jawa Barat 2013 – 2018. RKPD Tahun 2016 merupakan Tahun ke dua dokumen rencana operasional pembangunan, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek

Tahun 2016. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian Common Goals ke-4 tentang Jawa Barat Bebas Rawan Pangan dan Non Common Goals.

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2016 yang merupakan Tahun awal masa RPJMD, maka isu strategis Tahun 2016 adalah :

Tabel. 2.4  
Isu-Isu Strategis Badan Ketahanan Pangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Ketersediaan	Ketersediaan Energi dan protein selama tiga Tahun terakhir menunjukkan penurunan. Energi turun 1%/Tahun, Protein turun 7,72/Tahun	NBM	Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kebutuhan pangan terus meningkat</li> <li>-Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian</li> <li>-Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</li> <li>-Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;</li> <li>-Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan</li> </ul>	<p>Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.000 kkal dan protein 57 gr/kapita/hari masih tergantung pada pangan impor/luar daerah</p> <p>Lemahnya koordinasi lintas sektor</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Distribusi Harga Pangan	Distibusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidak stabilan harga pangan		Sistem pasar pangan yang belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil</li> <li>- Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan</li> </ul>	<p>Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan</p> <p>Lemahnya koordinasi lintas sektor</p>
Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH 70,2 poin	BPS	<p>Terbatasnya diversifikasi pangan</p> <p>Terbatasnya produksi pangan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang, aman dan halal</li> <li>- Budaya masyarakat "belum makan bila tidak makan nasi"</li> </ul>	penganekaragam pangan belum optimal
Kerawanan Pangan	Tingginya Prosentase Penduduk rawan pangan 13,02%	BPS	Belum terdatanya penduduk rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya daya beli masyarakat</li> <li>- Tingginya pangsa pengeluaran pangan (lebih dari 60%)</li> </ul>	Lemahnya koordinasi lintas sektor

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menjalankan tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat yang menangani Bidang Ketahanan Pangan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa, kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Musrenbang RKPD Provinsi /Kabupaten/Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten /Kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang Kabupaten/Kota adalah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan Tahunan kabupaten dan kota yang melibatkan para pelaku pembangunan kabupaten dan kota sebagai bahan masukan dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan, evaluasi kinerja pembangunan daerah Tahun sebelumnya, rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Renja OPD, Rancangan Awal RKPD Provinsi. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan APBN dengan tujuan :

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kab/kota Bidang Ketahanan Pangan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
2. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kab/kota pada musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kab/kota dilaksanakan;
3. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kab/kota; dan

4. menyepakati prioritas pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Setelah musrenbang kabupaten/Kota dilanjutkan Musrenbang Provinsi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan Tahunan provinsi khususnya mengenai Bidang Ketahanan Pangan yang melibatkan para pelaku pembangunan provinsi, sebagai bahan masukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan yang berasal dari Kabupaten/Kota, Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota, evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun sebelumnya, Rancangan RKPD Provinsi, hasil Pra Musrenbang, Rancangan Renja hasil forum OPD, Rancangan Renja KL, Rancangan RKP. Diharapkan hasil penyempurnaan RKPD Provinsi Tahun 2014, penyelarasan rancangan RKP dan Renja KL dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota, prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbangnas. Di bawah ini adalah hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan seperti pada tabel 2.5.



Tabel. 2.5  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016  
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>					<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>					
1.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan		Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	70 Persen	500.000	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan		Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	70 persen	436.705	
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>					<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>					
2.	Lingkungan bebas rawan pangan		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan melalui proses pendampingan	180 kelompok	2.484.750	Lingkungan bebas rawan pangan		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan melalui proses pendampingan	180 kelompok	2.146.190	
3.	Lingkungan bebas rawan pangan		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan melalui proses pendampingan	180 kelompok	4.500.000	Lingkungan bebas rawan pangan		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan melalui proses pendampingan	180 kelompok	4.500.000	HIBAH
4.	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		Menurunnya konsumsi beras	1,5 Persen	1.715.000	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		Menurunnya konsumsi beras	1,5 Persen	902.315	
5.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat		Meningkatnya kemampuan aparat ketahanan pangan tentang PPH	27 Kab/Kota	685.000	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat		Meningkatnya kemampuan aparat ketahanan pangan tentang PPH	27 Kab/Kota	283.090	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
6.	Lomba Cipta Menu berbasis pangan local di Jawa Barat		Terimplementasikan nya menu B2SA	27 Kab/Kota	400.000	Lomba Cipta Menu berbasis pangan local di Jawa Barat		Terimplementasikanny a menu B2SA	27 Kab/Kota	400.000	
7.	Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)		Terfasilitasinya sertifikasi Prima 3	27 Kab/Kota	2.355.000	Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)		Terfasilitasinya sertifikasi Prima 3	27 Kab/Kota	2.066.294	
8.	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Daerah Aliran Sungai Citarum		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan	150 Kelompok	1.955.000	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan	150 Kelompok	1.500.000	
9.	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Daerah Aliran Sungai Citarum		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan	150 Kelompok	3.937.500	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari		Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan	150 Kelompok	3.750.000	HIBAH
10.	Pengembangan desa mandiri pangan		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	1.000.000	Pengembangan desa mandiri pangan		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	716.450	
11.	Pengembangan desa mandiri pangan		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	6.000.000	Pengembangan desa mandiri pangan		Tertanganinya desa rawan pangan	70 Desa	7.000.000	HIBAH
12.	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	1.000.000	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	521.550	
13.	Kawasan Mandiri Pangan		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	3.000.000						
14.	Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	2.000.000	Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	1.000.000	
15.	Analisis ketersediaan pangan di Jawa Barat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	250.000	Analisis ketersediaan pangan di Jawa Barat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	133.580	
16.	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	5.000.000	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	1.222.500	
	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	2.000.000	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat		Tertanganinya desa rawan pangan	500 Kelompok	25.000.000	HIBAH
17.	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	3.000.000	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	2.266.825	
18.	Pemantauan Harga dan Pasokan Harga Pangan		Tersedianya data dan informasi harga	27 Kab/Kota	834.000	Pemantauan Harga dan Pasokan Harga		Tersedianya data dan informasi harga dan	27 Kab/Kota	510.555	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			dan pasokan pangan			Pangan		pasokan pangan			
19.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	1.361.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	900.870	
20.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	4.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	100 Kelompok	5.000.000	HIBAH
21.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	557.500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	485.085	
22.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	1.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)		Tertanganinya desa rawan pangan	30 Gapoktan	1.500.000	HIBAH
23.	Dewan Ketahanan Pangan		Tercapainya Jawa Barat Bebas Rawan Pangan	27 Kab/Kota	3.481.545	Fasilitasi Ketahanan Pangan Jawa Barat		Tercapainya Jawa Barat Bebas Rawan Pangan	27 Kab/Kota	1.254.695	
24.	Pengembangan manajemen kelembagaan dan infrastruktur pangan		Meningkatnya pengetahuan aparat	27 Kab/Kota	2.596.000	Pengembangan manajemen kelembagaan dan infrastruktur pangan		Meningkatnya pengetahuan aparat	27 Kab/Kota	1.119.000	
C.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi					
25.						Sistem Informasi Ketahanan Pangan		Tersajinya data dan informasi ketahanan pangan	1 Program	500.000	Usulan Baru
D.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
26.	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur		Terpenuhinya kebutuhan operasional aparatur unit kerja OPD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat	76 Orang	500.000	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur		Terpenuhinya kebutuhan operasional aparatur unit kerja OPD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat	76 Orang	324.500	
<b>E.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
27.	Penyelenggaraan asministrasi perkantoran BKPD		Terfasilitasnya penyelenggaraan administrasi perkantoran	1 Tahun	1.500.000	Penyelenggaraan asministrasi perkantoran BKPD		Terfasilitasnya penyelenggaraan administrasi perkantoran	1 Tahun	1.367.500	
<b>F.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Parasarana Aparatur</b>					<b>Program Peninkatan sarana dan Parasarana Aparatur</b>					
28.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPD		Tersedianya peralatan dan perlengkapan barang/bahan penunjang pekerjaan	76 Orang	2.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPD		Tersedianya peralatan dan perlengkapan barang/bahan penunjang pekerjaan	76 Orang	2.146.225	
<b>G.</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
29.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur BKPD		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat	76 Orang	1.500.000	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur BKPD		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat	76 Orang	4.203.775	
<b>H.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
30.	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BKPD		Tersusunnya data laporan capaian kinerja meliputi laporan Renja, LKIP,	100 Persen	200.000	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BKPD		Tersusunnya data laporan capaian kinerja meliputi laporan Renja, LKIP,	100 Persen	96.550	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			LPJ, LPPD, RKA, DPA/DPPA dan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan Tahunan					LPJ, LPPD, RKA, DPA/DPPA dan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan Tahunan			
I.	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</b>					<b>Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</b>					
31.	Penyusunan dan penyajian data statistic ketahanan pangan		Tersajikannya data dan informasi/ statistic ketahanan pangan	1 Dokumen	250.000	Penyusunan dan penyajian data statistic ketahanan pangan		Tersajikannya data dan informasi/ statistic ketahanan pangan	1 Dokumen	750.000	

### BAB. III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN

---

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan periode 2013-2018 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pementapan secara terpadu dan terkoordinasi yaitu: Pengembangan Desa Mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Transien, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra pangan, serta Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada sisi lain, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam rangka mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, direncanakan akan didorong lebih cepat dan berkelanjutan, termasuk didalamnya aspek keamanan pangan segar.

Prioritas Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/nasional, 7 sasaran makro Ketahanan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap Tahun;



3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per Tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2015 sebesar 93,3;
5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;
7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun selama periode Tahun 2013-2018.

#### **A. Visi Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Jawa Barat yaitu “Maju dan Sejahtera untuk Semua”, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, maka Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 – 2018 adalah :

**“Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan  
yang Berkelanjutan”**

Arti dari visi tersebut adalah bahwa Badan Ketahanan Pangan berkeinginan menjadi institusi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas secara terus menerus setiap waktu diseluruh pelosok wilayah Jawa Barat.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor
2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan**

### *1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor*

Tujuan : Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan

Sasaran :

- a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energy dan protein masyarakat Jawa Barat, energy sebesar 2.700 kkal/kapita /hari dan protein sebesar 80 gram/kapita/hari pada Tahun 2018.
- b. Mempertahankan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) minimal sebesar 400 ton setiap Tahun, serta cadangan pangan masyarakat sebanyak 2.500 lumbung pada Tahun 2018.
- c. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis ( $CV > 10\%$ ).
- d. Terjaganya stabilitas harga Gabah di tingkat petani, minimal sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

- e. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk 10 komoditas pangan di 26 Kab/Kota.

*2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal*

Tujuan : Memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.

Sasaran :

- a. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/hari dan protein sebesar 57 gram/hari.
- b. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80 pada Tahun 2018.
- c. Menurunnya konsumsi beras menjadi 83 Kg/kapita/Tahun pada Tahun 2018, diiringi dengan peningkatan konsumsi pangan lokal.
- d. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat sebesar 90% pada Tahun 2018.

*3. Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*

Tujuan : Menurunkan Penduduk Rawan Pangan

Sasaran : Tertanganinya 813 Desa Rawan Pangan sampai dengan Tahun 2018.

*4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan*

Tujuan : Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

Sasaran :

- a. Meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan melalui Rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan minimal 2 kali dalam setahun.
- b. Meningkatnya system pelayanan dan kesekretariatan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Barat.

- c. Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan disiplin aparat, ditandai dengan meningkatnya jumlah aparat yang mengikuti diklat serta menurunnya tingkat pelanggaran disiplin.
- d. Meningkatnya system pelaporan yang ditandainya ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%) Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mengakses Pangan	Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
			Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	57	59	60	62	63
			Penguatan Cadangan Pangan *)	200 ton	200 ton	200 ton	200 ton	200 ton
		Pangan terdistribusikan secara merata ke setiap daerah	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan *)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Stabilitas Harga Pangan Pokok <10%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Harga Gabah di Tingkat Petani sesuai HPP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	1.800	1.800	2.000	2.000	2.150
			Konsumsi Protein (kkal/kapita/hari)	50	50	52	52	52
			Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72	74	76	78	80
			Menurunnya Konsumsi Beras (Kg/kapita/th)	90	88	85	84	83

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%) Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan *)	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3	Menurunkan penduduk rawan pangan	Tertanganinya 813 Desa Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan *)	70%	75%	80 %	85 %	90 %
			Tertanganinya Desa Rawan Pangan	560	410	260	110	107
4	Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya peran dan fungsi Kelembagaan Ketahanan Pangan	Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan	2 kali	4 kali	6 kali	8 kali	10 kali
			Advokasi Dewan Ketahanan Pangan (Kab/Kota)	6	12	18	24	27
		Meningkatnya system pelayanan dan kesekretariatan	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan disiplin aparatur.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	5	10	15	20	25
		Meningkatnya Efektivitas Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %

## A. Strategi dan Kebijakan

### 1. Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor

#### Strategi :

Akses pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu Koordinasi lintas sector melalui peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk :

- Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,
- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual, pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.

**Kebijakan :**

- a. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis.
- c. Pengembangan Buffer Stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis.

**2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal**

**Strategi :**

- Peningkatan Skor PPH melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.
- Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
- Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro



(kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua Tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya;

- Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

**Kebijakan :**

- a. Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018.
- b. Implementasi Peraturan Gubernur No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal
- c. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;
- d. Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat

**3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat**

**Strategi :**

- Meningkatkan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai.
- Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan.

**Kebijakan :**

- a. Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 465.05/Kep 367-BPMPD/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture

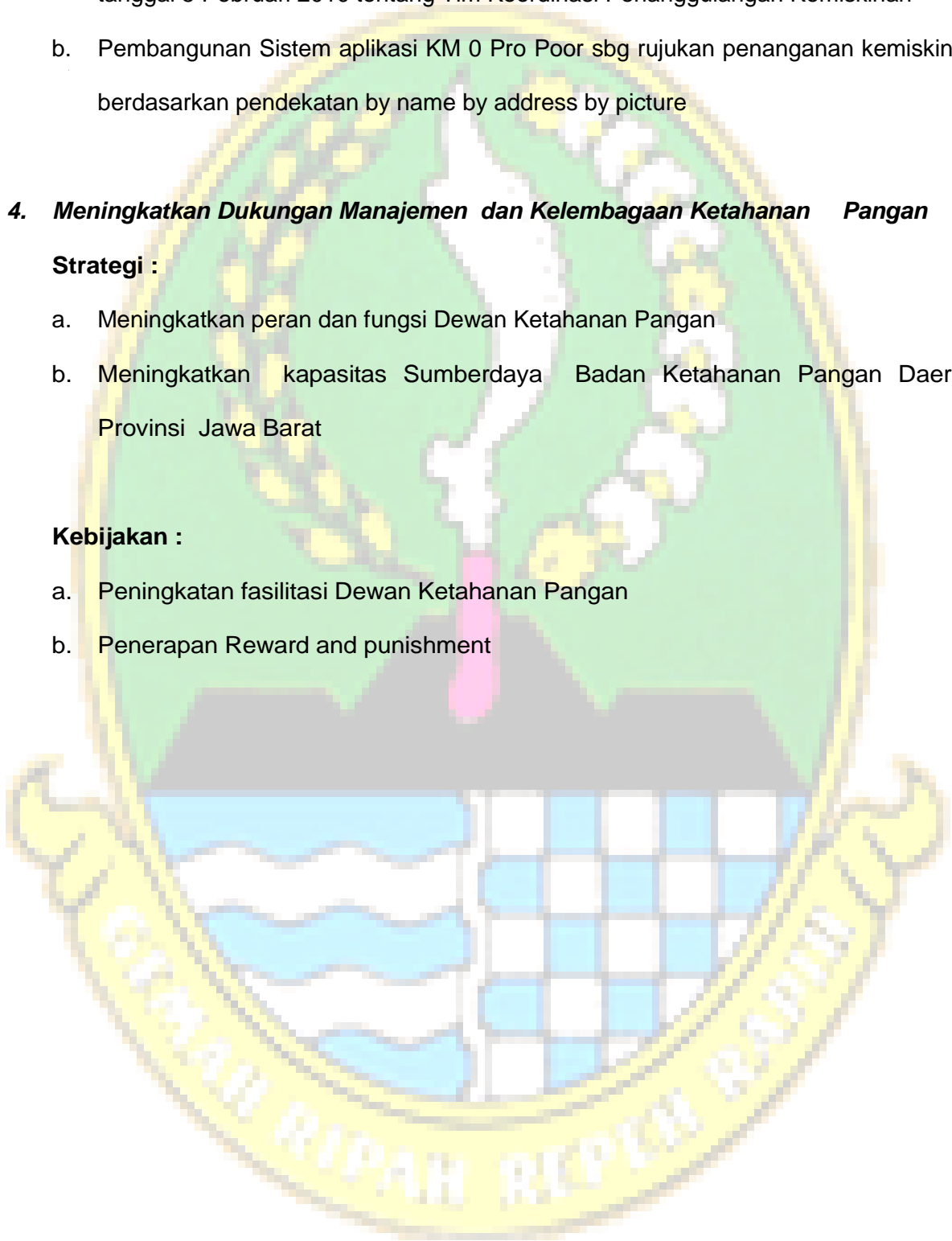
**4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan**

**Strategi :**

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

**Kebijakan :**

- a. Peningkatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
- b. Penerapan Reward and punishment



Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : “Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”</b>			
<b>MISI I Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mengakses Pangan	Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup	- Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.	- Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	Pangan terdistribusikan secara merata ke setiap daerah	- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,	- Pengembangan Sistem Resi Gudang
		- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan	- Pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis.  - Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

MISI II Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.</li> <li>- Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya</li> <li>- Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana</li> <li>- Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018.</li> <li>- Implementasi Pergub No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal</li> <li>- Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;</li> <li>- Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat</li> </ul>

<b>MISI III Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan, melalui Pemberdayaan Masyarakat</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan penduduk rawan pangan	Tertanganinya 813 Desa Rawan Pangan	<p>Meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai.</p> <p>Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan.</p>	<p>Implementasi Keputusan Gubernur No. 465.05/Kep 367-BPMPD/2010 tanggal 5 Feb 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture</p>

<b>MISI IV Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	<p>Meningkatnya koordinasi Bidang Ketahanan Pangan antar tingkat pemerintahan</p> <p>Meningkatnya system pelayanan dan kesekretariatan</p> <p>Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan disiplin aparatur.</p> <p>Meningkatnya system pelaporan</p>	<p>Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan</p> <p>Meningkatkan kapasitas aparatur BKPD Jawa Barat</p>	<p>Peningkatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan</p> <p>Penerapan Reward and punishment</p>

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam mewujudkan Visi Jawa Barat yaitu "Maju dan Sejahtera untuk Semua", Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke pertama dan kedua.

Misi pertama, **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**, salah satu sasarnya adalah Pemenuhan hak dasar manusia. Pemenuhan hak dasar manusia adalah hal mendasar yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Jawa Barat, karena pada hakekatnya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehidupan dasar dari warganya berlangsung dengan baik. Salah satu hak dasar tersebut adalah pemenuhan pangan yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Jawa Barat, yang diimplementasikan melalui program-program yang mendukung bagi terwujudnya **Jawa Barat Bebas Rawan Pangan**.

Misi ke dua, **Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**, salah satu sasarnya adalah memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional. Pembangunan ekonomi perdesaan mensyaratkan kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.



Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan diyakini merupakan salah satu jalan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya yang sebagian besar berada di perdesaan.



Tabel. 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

<b>Visi : "JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi 1.</p> <p><i>Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Beradaya Saing</i></p> <p>Sasaran : <i>Jawa Barat Bebas Rawan Pangan</i></p>	<p>Tingginya penduduk rawan pangan 13,02 %.</p> <p>Rendahnya koordinasi lintas sektor</p>	<p>Tingginya prosentase penduduk miskin dengan kemampuan daya beli yang rendah</p>	<p>Program-program Pengentasan Kemiskinan Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan</p>
	<p>Misi 2.</p> <p><i>Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan,</i></p> <p>Sasaran : <i>Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional</i></p>	<p>Rendahnya kesejahteraan petani sebagai pelaku produksi pangan.</p>	<p>Tidak stabilnya harga pangan di tingkat petani</p>	<p>Adanya program peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan</p>

#### **b. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran**

Dalam menyusun program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

## **A. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

01. Kegiatan Perencanaan Pembangunan ketahanan Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 436.705.000,-

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, Ketahanan Pangan merupakan salah satu prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dan arah kebijakan kementerian pertanian dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan Tahun 2014 diarahkan pada : (1) peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis pangan local dengan skor PPH 91,5 dan berkurangnya konsumsi beras 1,5 % perkapita perTahun, (2) pengurangan jumlah penduduk rawan pangan 1 persen tiap Tahun dan antisipasi rawan pangan transien, (3) stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan Gapoktan dan cadangan pangan masyarakat, (4) kawasan rumah pangan lestari (KRPL) sebagai lumbung pangan rumah tangga, (5) optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lumbung hidup bagi keluarga.

Pencapaian sasaran pembangunan ketahanan tersebut membutuhkan sinergitas antar tingkatan pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat yang dikoordinasikan dan direncanakan pada Tahun ke Tahun memerlukan pemikiran-pemikiran yang tepat, cerdas dan sistematis guna mencapai Ketahanan Pangan yang mantap dan sekaligus dapat memuaskan masyarakat dalam arti masyarakat yang rawan pangan setidaknya dapat dikurangi dari Tahun ke Tahun.

## **B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

2. Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.146.190.000,-
3. Hibah Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-

Keluarga adalah elemen terkecil dalam rumah tangga yang dapat menentukan dan membentuk kualitas manusia terutama anak-anak sebagai generasi penerus, oleh karena itu keluarga juga harus mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi serta menerapkan perilaku sadar gizi yang baik untuk seluruh anggota keluarganya. Perilaku sadar gizi adalah pengetahuan sikap dan praktek keluarga dalam mewujudkan status gizi yang baik. Perilaku tersebut meliputi kebiasaan menimbang berat badan secara teratur, mengkonsumsi makanan beragam, bergizi seimbang, aman dan halal serta berperilaku hidup sehat.

Kasus gizi buruk terjadi pada keluarga yang memang sulit mengakses pangan disebabkan rawan daya beli, distribusi yang tidak lancar atau terjadi bencana alam, kasus gizi buruk juga dapat terjadi pada keluarga mampu yang menerapkan pola hidup yang salah karena minimnya pengetahuan mengenai status gizi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi keluarga dan mendekatkan akses pangan untuk keluarga rawan pangan, pada Tahun Anggaran 2013-2018 Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan kegiatan fasilitasi Lingkungan Bebas Rawan Pangan dengan anggaran bersumber dari APBD.

4. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan rencana anggaran sebesar Rp.902.315.000,-

Jumlah penduduk Jawa Barat yang relatif besar dan mengalami peningkatan yang signifikan merupakan tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Kondisi tersebut memerlukan jumlah ketersediaan pangan di Jawa

Barat harus tetap mencukupi sesuai dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini semakin berat mengingat alih fungsi lahan semakin tinggi sehingga ketersediaan lahan untuk pertanian semakin terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama Tahun 2000-2010 adalah sebesar 1,90 %, sementara pertumbuhan produksi pangan, hanya 1,48 %.

Salah satu cara untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap salah satu jenis sumber karbohidrat yaitu beras. Sumber karbohidrat lain yang dapat dimanfaatkan dan merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan di Jawa Barat adalah singkong, ubi jalar, jagung, ganyong, sukun dan lain-lain. Sumber karbohidrat tersebut dari segi kesehatan relatif lebih baik dilihat dari sudut kesehatan karena Glikemic Indeksnya (GI) lebih rendah dibanding beras. GI umbia-umbian adalah 45 sampai 50 sedangkan beras mencapai 90. GI adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit Diabetes Melitus (DM), makin tinggi GI makin besar kecenderungan menderita penyakit (DM). Saat ini konsumsi beras di Jawa Barat 90,59 kg/kapita/Tahun, dan diharapkan terjadi penurunan sebesar 1.5 % perTahun.

5. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 283.090.000,-

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi , budaya dan agama. Berdasarkan UU no 18 Tahun 2012 pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut FAO-RAPA (1989), PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan bagi masyarakat.

Untuk hidup aktif dan sehat manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi (KH, Protein, Lemak Vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dan berasal dari berbagai jenis makanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, kebutuhan energi dan protein setiap orang adalah 2150 kkal dan 57 gram protein setiap harinya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan skor PPH adalah dengan Diversifikasi Pangan atau Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dimana tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam komposisi yang seimbang bagi setiap individu. Program untuk meningkatkan skor PPH adalah penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat mudah diakses oleh seluruh keluarga, salah satunya dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan fokus mengembangkan pangan hewani yang mudah dibudidayakan dan terjangkau harganya. Selain itu Pengembangan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat non beras sebagai upaya menurunkan ketergantungan pada beras dan terigu.



6. Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal di Jawa Barat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-

Dalam upaya menumbuhkembangkan budaya pemanfaatan bahan pangan lokal guna menekan penggunaan bahan pangan pokok terigu yang selama ini menjadi kebutuhan pengolahan bahan makanan masyarakat Jawa Barat, perlu disosialisasikan manfaat dan fungsi pangan lokal yang bisa mengganti bahan pangan terigu.

Guna menarik minat masyarakat untuk membudidayakan pangan lokal dan pengolahannya, kegiatan lomba cipta menu dengan bahan pangan lokal ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan keberagaman fungsi dan manfaat pangan lokal yang tidak kalah dari bahan pangan terigu.

7. Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-

Memperoleh makanan yang cukup, bergizi dan aman adalah hak setiap manusia (FAO/WHO International Conference on Nutrition : World Declaration on Nutrition, 1992), sedangkan Tahun 1997 CODEX mengharuskan bahwa makanan tidak boleh mengakibatkan bahaya bagi konsumen. Berangkat dari hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menyebutkan bahwa Menteri Pertanian melalui Kepala Daerah berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. OKKPD Jawa Barat dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.236-BKPD/2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, tanggal 26

Januari 2010, dan telah lulus Verifikasi oleh OKKP Pusat pada tanggal 30 November 2010 dengan nomor OKKP-P-LSP -010.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, sedangkan fungsinya adalah mengeluarkan sertifikat Prima 2 dan Prima 3.

Tujuan dari pengawasan pangan adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan keamanan pangan bagi masyarakat, mencegah masuknya komoditas pangan segar yang tidak memenuhi syarat-syarat sanitary dan phytosanitary, meningkatkan daya saing produk pertanian segar Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional serta meningkatkan kesadaran produsen dan pelaku usaha mengenai pentingnya menerapkan cara-cara bertani yang baik sesuai dengan prinsip GAP dan PHT dengan slogan aman " From Farm to Table" artinya aman mulai dari proses produksi sampai siap di konsumsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka OKKPD siap memverifikasi pelaku untuk mendapatkan sertifikat sebagai jaminan produk aman dikonsumsi.

8. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-
9. Hibah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.750.000.000,-

Pemanfaatan pekarangan rumah bisa memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta masyarakat secara lestari dalam suatu kawasan.

Pengembangan KRPL dapat memelihara sumber daya genetik. Selain itu, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

"Sasaran program kerja KRPL adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan

gizi secara lestari, selain menuju keluarga dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

10. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 716.450.000,-
11. Hibah Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,-

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Atas pemikiran tersebut, kegiatan Desa Mandiri Pangan perlu terus didorong dan ditingkatkan pencapaiannya agar Desa yang sudah dibentuk yaitu mulai Tahapan Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan kemandirian dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja pembinaan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke pendamping. Tim Teknis yang sudah dibentuk dapat dioptimalkan yaitu dengan melakukan

pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta telaahan yang mendalam serta dicarikan solusi dan pemecahan masalah secara berjenjang.

Pemberdayaan masyarakat perlu diintensifkan agar berdaya dan memiliki usaha ekonomi produktif yang lebih berkembang. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas mampu mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

12. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 521.550.000,-

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Sistem Informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan. Kemudian dalam Pasal 114 dijelaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, minimal digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan harga pangan, sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

Penerapan SKPG sangat diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana sebagian aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban ; (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab, (2) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya

mutu, gizi dan keamanan pangan, (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat, dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan . Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai pada Tahun 2016 sebesar 60 %.

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Kegiatan analisis tersebut dilaksanakan secara rutin bulanan dan Tahunan, selanjutnya dari Hasil analisis SKPG tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat Provinsi.

Angka kerawanan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) (kurang dari 70 % AKG adalah rawan pangan). AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di suatu negara. AKG diperoleh dari data Susenas BPS setiap Tahun.

Dalam melaksanakan SKPG, Pemerintah Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Provinsi dilaporkan kepada Gubernur untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada Tahun berikutnya.

13. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimisasi Lahan Pekarangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Untuk meningkatkan gizi terutama gizi keluarga di daerah rawan pangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah dengan pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh keluarga sehingga mudah untuk pemeliharaan dan pemanenan hasilnya.

Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makanan, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak dan ikan, dan lain-lain. Apabila dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2013-2018 Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

14. Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 133.580.000,-

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan hakekat pembangunan pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang –undang ini juga menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. Undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan Pemerintah (PP) antar lain : (1) PP No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan yang mengatur dan mencakup aspek ketersediaan pangan cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan



masalah pangan, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan kerja sama internasional; (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan dibidang label dan iklan pangan dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (3) PP No. 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran kewilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal dibidang mutu dan gizi pangan.

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Kebijakan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018 adalah peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan. Kebijakan tersebut dilakukam melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan sasaran sebagai berikut: (1) meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok

beras, jagung dan kedelai; (2) menurunnya tingkat kehilangan hasil panen; (3) menurunnya kerawanan pangan masyarakat; (4) tertatnya distribusi dan perdagangan beras; (5) meningkatnya keaneragaman konsumsi, kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang Tahun sampai tingkat rumah tangga dan (6) meningkatnya pengendalian keamanan pangan.

Untuk mewujudkan kebijakan diatas, melalui Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2008 telah dibentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan, dimana dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah memiliki fungsi (1) Penyelenggaraan Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan; (2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi dan harga pangan; (3) penyelenggaraan kordinasi dan pembinaan UPTB dan (4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

15. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.222.500,-

16. Hibah Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,-

Penguatan cadangan pangan masyarakat, perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat selain dikembangkan CPPD pemerintah daerah juga wajib dikembangkan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Sehingga masyarakat pangan miskin dapat mengelola CPM sesuai potensi dan kebutuhan.

Penguatan CPM dapat diselenggarakan melalui swadaya masyarakat sendiri, juga dapat dilakukan melalui fasilitas anggaran APBD Provinsi maupun

kabupaten/kota. Fasilitas anggaran tersebut digunakan untuk membangun/merenovasi fisik lumbung dan untuk pengadaan gabah/beras. Pembangunan/renovasi fisik lumbung dan pengadaan gabah/beras dilakukan oleh kelompok.

Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sejak Tahun 2008 telah terfasilitasi sebanyak 978 lumbung dengan jumlah alokasi dana hibah/bantuan sosial sebesar Rp. 28.240.000.000,- melalui APBD Provinsi realisasi pengembangan LPM pada Tahun 2008 sebesar Rp. 1.810.000.000,- Tahun 2009 sebesar Rp. 1.360.000.000,- Tahun 2011 sebanyak 149 lumbung senilai Rp. 4.470.000.000,- Tahun 2012 sebanyak 149 lumbung senilai Rp. 4.450.000.000, Tahun 2013 sebanyak 363 lumbung senilai Rp. 16.150.000.000, Tahun 2014 dialokasikan untuk 500 lumbung senilai Rp. 25.000.000.000, dan selanjutnya akan diprogramkan setiap Tahun minimal 500 lumbung.

Dalam hal ketersediaan pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

Ketersediaan pangan meliputi atas lokasi dan atas waktu hingga ke rumah tangga untuk menjamin setiap rumah tangga bahkan individu dapat mengakses pangan dengan mudah dan berkualitas.

Untuk mendukung tercapainya kondisi ketersediaan pangan yang baik dan berkelanjutan, perlu dilakukan analisis ketersediaan pangan secara rutin dan berkelanjutan. Output analisis dalam bentuk Neraca Bahan Makanan (NBM)

yang berisikan keadaan produksi di Jawa barat, bahan pangan yang masuk dan keluar Jawa Barat serta tercecer dan dikonsumsi diluar kebutuhan pangan bagi manusia.

Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan :

- a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
- c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
- f. membangun kawasan sentra produksi pangan.

Hasil analisis ketersediaan pangan dapat diketahui jumlah pangan yang ada di Jawa Barat setiap kelompok komoditas bahan pangan yaitu: padi-padian, kacang-kacangan, buah biji berminyak, buah dan sayur, gula, protein hewani, protein nabati, daging dan lainnya.

Ketersediaan kelompok bahan pangan tersebut diketahui kondisinya apakah surplus atau minus, Terhadap kondisi ketersediaan tersebut dilakukan penanganan mulai dari peningkatan produksi sendiri sampai perdagangan termasuk manajemen stok.

17. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.266.825.000,-

Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berkewajiban mengembangkan cadangan

pangan pemerintah daerah. Untuk hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2009 telah mengembangkan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah (CPPD) dengan jumlah pengadaan kumulatif sampai Tahun 2013 mencapai 1.009,839 ton beras dengan perincian: Tahun 2009 sebesar 545,454 ton, Tahun 2012 sebesar 257,985 ton dan Tahun 2013 sebesar 206,400 ton. Pada Tahun 2014 direncanakan pengadaan sebesar 206,400 ton. Hal ini juga sejalan dengan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010, bahwa pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan cadangan pangan minimal setara 200 ton beras. Demikian halnya pemerintah kabupaten/kota, juga berkewajiban menyelenggarakan cadangan pangan pokok beras minimal 100 ton.

Pengembangan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sejak Tahun 2009. Metodenya bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Jawa Barat. Pengadaan CPPD dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dengan sebesar anggaran APBD Provinsi Jawa Barat. Kemudian Beras dikelola oleh Perum Bulog Divre Jawa Barat untuk nantinya disalurkan ke lokasi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

Selama kurun waktu 2008-2013 telah disalurkan CPPD Pemprov Jawa Barat sebanyak 689.313 ton untuk menangani masyarakat rawan pangan sebanyak 93.348 KK, tersebar di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang.

18. Pemantauan Harga dan Pasokan Harga Pangan Jawa Barat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 510.555.000,-

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Penyediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dihormati oleh komunitas dunia sebagai salah satu hak asasi, karena setiap insan di dunia mempunyai hak untuk bebas dari kelaparan. Komitmen nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertama adalah memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia; kedua adalah pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Kondisi ketersediaan pangan, berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.



Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang dapat disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), gelombang tinggi dan kurang baiknya sarana transportasi.

Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan, perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (up to date) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak.

Salah satu pendekatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau berkala (time series) dari sasaran yang sama. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan rumusan kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan.

Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menjelang hari-hari besar keagamaan, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat, disisi lain pada waktu yang bersamaan produksi beberapa komoditas bahan pangan menurun karena belum memasuki masa panen. Kondisi demikian,

jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan harga-harga bahan pangan pokok di luar batas kewajaran.

Gejolak harga pangan menjelang HBKN biasanya dimanfaatkan oleh segelintir orang (spekulan) untuk meraup keuntungan. Disisi lain permintaan yang tinggi dan pasokan yang tetap menyebabkan kenaikan harga pangan secara otomatis.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional, Pemerintah berkewajiban mengupayakan terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusi pangan dengan harga yang wajar/terjangkau sehingga masyarakat dapat menjalani hari besar keagamaan dengan tenang dan khidmat.

19. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 900.870.000,-
20. Hibah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Indonesia sebagai wilayah sentra produksi pertanian yang sangat luas, khususnya padi dan jagung, tersebar pada topografi beragam, sementara Gapoktan yang berada di wilayah tersebut memiliki keterbatasan sarana prasarana (produksi, pengolahan, penyimpanan), kepemilikan sarana yang sangat bervariasi, waktu panen yang tidak bersamaan pada beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya. Dengan kondisi tersebut, petani, kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah antara lain: (i) keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran setelah panen; (ii) rendahnya posisi tawar petani pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, dan (iii) keterbatasan akses pangan (beras) untuk dikonsumsi saat mereka menghadapi paceklik karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, Poktan dan/atau Gapoktan tersebut yang tidak dapat melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian/pemasaran hasil produksinya, maka dapat mempengaruhi: (i) ketidakstabilan harga untuk komoditas gabah/beras dan jagung di wilayah sentra produksi pada saat terjadi panen raya, dan (ii) kekurangan pangan (beras) pada saat musim paceklik ataupun gagal panen.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak Tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, Pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dari APBN kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan.

Sampai Tahun 2013, Jawa Barat telah mempunyai 138 Gapoktan LDPM terdiri dari 49 LDPM tahap pasca kemandirian (2009), 33 LDPM tahap pasca kemandirian (2010), 21 LDPM tahap kemandirian, 27 LDPM tahap pengembangan serta 8 Gapoktan LDPM tahap penumbuhan direncanakan pada Tahun 2014 akan di salurkan kembali dana bansos penguatan LDPM yang bersumber dari APBN kepada 9 Gapoktan.

Melalui fasilitas penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya melakukan aktifitas antara lain membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya.

21. Penguatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) dengan rencana anggaran sebesar Rp485.085.000,-
22. Hibah Penguatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000

Salah satu pilar ketahanan pangan adalah aksesibilitas pangan baik di tingkat wilayah maupun rumah tangga. Akses pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan karena merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Apabila salah satu sub sistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu Negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Akses pangan adalah kemampuan kelompok, rumah tangga, atau individu untuk memenuhi kecukupan pangan setiap saat baik dari produksi sendiri, pembelian, pemberian/bantuan lain berdasarkan sumberdaya yang dikuasai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Sumber daya yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kecukupan pangan tersebut terdiri dari sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, ekonomi (financial) dan sumber daya sosial.

Akses pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan karena merupakan salah satu pilar ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Dengan kata lain, meski secara fisik pangan tersedia namun jika masyarakatnya tidak mampu mengaksesnya maka ketahanan pangan tidak akan terwujud. Kemampuan akses pangan rumah tangga dikatakan baik apabila rumah tangga mampu menjangkau pangan yang tersedia baik secara fisik, ekonomi dan social budaya, untuk memenuhi kebutuhan gizi anggotanya setiap saat.

Permasalahan akses pangan disebabkan adanya gangguan terhadap potensi sumber daya. Gangguan ini meliputi guncangan berupa konflik sosial, adanya ketidakseimbangan akses terhadap layanan dasar, pemutusan hubungan sosial dan sharing mechanism, pengurangan jaminan pengamanan sosial, dan bencana alam. Sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan masalah tersebut maka salah satu kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat adalah melakukan pemantauan akses pangan di tingkat rumah tangga miskin di Kecamatan yang merupakan daerah rawan pangan hasil Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2011.

Pemantauan Akses Pangan dimulai Tahun 2013 sebanyak 12 desa dan dilanjutkan di Tahun 2014 di 12 desa, yang kegiatannya meliputi pemantauan akses pangan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat di desa melalui pemantauan pengeluaran pangan dan non pangan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan di tempat tinggalnya, yang ke depan akan difasilitasi melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM). Kegiatan dalam rangka peningkatan akses pangan ini diharapkan dapat diikuti dengan koordinasi dan keterpaduan program dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan intervensi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan khususnya di Jawa Barat.

23. Dewan Ketahanan Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.254.695.000,-

Dewan Ketahanan Pangan sebagai institusi koordinasi fungsional bertanggung jawab memfasilitasi berberbagai pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Pertemuan dilaksanakan untuk menggalang keterlibatan pemerintah daerah, organisasi non pemerintah (LSM, Pondok Pesantren, PKK, Perusahaan Swasta, Organisasi profesi dan organisasi pelaku) untuk lebih peduli terhadap

pentingnya pemenuhan pangan bagi masyarakat dan ketahanan nasional serta menyadarkan semua pihak bahwa tanggung jawab mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera terbebas dari kemiskinan dan kelaparan terletak pada seluruh komponen masyarakat (Pemerintah Daerah dan Masyarakat).

Disadari bahwa koordinasi kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan masih ditemukan kelemahan maka perlu diperkuat kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan gizi melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah. Selain itu juga perlu diperkuat melalui kelembagaan adhoc seperti Dewan Ketahanan Pangan yang diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi Gubernur dalam menetapkan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan.

Tugas Dewan Ketahanan Pangan diantaranya : (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, (b) merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan (c) melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Pokja Teknis. Peran Pokja Ahli di Dewan Ketahanan Pangan sebagai konseptor, mediator, monitor dan diseminator (berperan sebagai penyebar). Sedangkan Tugas Pokok Pokja Ahli diantaranya membantu mempersiapkan bahan dan draft untuk kegiatan evaluasi dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta menjadi tenaga ahli dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat DKP.

Pokja Ahli terdiri dari kumpulan orang (minimal 4 orang) yang berkaitan dengan keahlian dan keilmuan di Bidang Ketahanan Pangan (pertanian dalam arti luas, sosial ekonomi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan ahli gizi) dan bukan mewakili lembaga yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. Secara organisasi, kedudukan Pokja Ahli berada di bawah



Ketua Harian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

24. Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.119.000.000,-

Berkenaan dengan pengelolaan pangan, peran kelembagaan menjadi sangat penting karena secara empiris operasionalisasi pengelolaan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini kelembagaan formal yang memiliki legalisasi hukum, akan tetapi juga melibatkan kelembagaan non formal yang mendasar dan melekat dengan masyarakat yang justru secara signifikan memberikan dampak yang nyata terhadap terwujudnya sebuah masyarakat yang mandiri. Selanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, tercapainya ketahanan pangan itu pada dasarnya berkaitan dengan keberhasilan usahatani. Sementara itu keberhasilan usahatani tidak hanya ditentukan ketersediaan teknologi. Faktor kelembagaan dalam penyiapan dan penerapan teknologi, serta mekanisme penyiapan dan penerapan teknologi juga memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan usahatani. Inti dari kelembagaan itu sendiri adalah adanya “Interaksi” yang melahirkan bentuk “aktifitas”.

Adanya kelembagaan menjadi prasyarat teradopsinya inovasi secara sustainable dalam pengembangan usahatani. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa adopsi teknologi berakhir seiring dengan berakhirnya proyek; apabila tidak ada kelembagaan pedesaan yang mampu menyediakan kebutuhan petani seperti benih/bibt, pupuk, modal kerja dan fasilitas pemasaran. Ketersediaan inovasi teknologi dinilai penting (necessary condition), tetapi belum cukup untuk menghantarkan petani ke arah ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Adapun syarat kecukupan (Sufficiency condition) dalam pengelolaan pangan adalah kelembagaan yang mencakup semua elemen pendukung pengelolaan pangan dan keterkaitannya serta kebijakan pendukung pengembangan. Kelembagaan

dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi teknologi dalam pengelolaan pangan secara optimal.

Dari sebuah kajian ilmiah mengenai strategi optimalisasi inovasi kelembagaan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah diberikan beberapa kesimpulan yaitu : (1) Keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, akan tetapi juga ditentukan oleh unsur kelembagaan pendukungnya, baik bersifat formal maupun non formal. Teknologi menjadi syarat keharusan sedangkan kelembagaan merupakan syarat kecukupan; (2) Keberadaan kelembagaan formal dan non formal memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan di level nasional maupun daerah dalam perannya memfasilitasi akses terhadap teknologi yang telah tersedia maupun yang diperlukan dan belum tersedia, menyediakan kebutuhan petani, fasilitasi modal kerja dan pemasaran; (3) Kelembagaan ketahanan pangan yang optimal dicirikan oleh konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan yang mencakup prinsip kebutuhan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, manfaat, pemerataan dan keberlanjutan.

Terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan ketahanan pangan secara umum meliputi infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik meliputi sarana transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan listrik. Buruknya kondisi infrastruktur tersebut akan berdampak terhadap produksi dan daya saing, distribusi serta akses pangan yang merupakan pilar-pilar penyangga ketahanan pangan suatu daerah. Disamping itu, infrastruktur penunjang lain seperti sarana pergudangan, sarana pengolahan, pasar, terminal dan lain-lain memberikan peran yang nyata terhadap kondisi perekonomian suatu daerah.

Selanjutnya, infrastruktur non fisik seperti lembaga keuangan (Bank-Bank) dan asuransi, kebijakan pemerintah, dan iptek menjadi bagian yang tak kalah penting. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan ketahanan pangan,

pemerintah bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban untuk terus berupaya menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.

Menyadari hal-hal tersebut di atas, maka Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan.

**C. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.**

Kegiatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-

Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Barat berdiri dengan mengemban visi menjadi institusi andal dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mengingat kelembagaan teknis nya bertugas untuk memberikan bahan kebijakan dalam membangun ketahanan pangan di Jawa Barat kepada Gubernur, maka disusun beberapa bahan kajian yang berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pangan di Jawa Barat, baik yang lalu, sekarang maupun prognosis yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Tupoksinya, BKPD tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dalam melaksanakan analisis kondisi pangan di Jawa Barat selalu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan OPD penghasil data bidang ketahanan pangan.

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 324.500.000,-

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan aparat Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa barat, pada Tahun Anggaran 2013-2018, akan

dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

**E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, pada Tahun Anggaran 2013-2018 akan dilaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dananya bersumber dari APBD.

Dalam upaya menunjang penyelenggaraan operasional administrasi perkantoran, maka pada Tahun Anggaran 2013-2018 akan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dananya bersumber dari APBD

**F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.146.225.000,-

Untuk meningkatkan Pengadaan sarana, prasarana dan Jasa Perkantoran, pada Tahun Anggaran 2016 akan dilaksanakan Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan Jasa Perkantoran yang dananya bersumber dari APBD

**G. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.203.775.000,-

Untuk meningkatkan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, pada Tahun Anggaran 2016 akan dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat

#### **H. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 96.550.000,-

Dalam rangka meningkatkan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan, maka pada Tahun Anggaran 2016 akan dilaksanakan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat

#### **I. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Statistik Ketahanan Pangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-

Pencapaian visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, tidak terlepas dari ketersediaan data yang berkesinambungan dalam berbagai tahapan pembangunan ketahanan pangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan pada evaluasi pembangunan ketahanan pangan.

Data yang disusun secara konferhensif, terstruktur, dan terkompilasi dalam bentuk bank data ketahanan pangan yang informatif, merupakan hal yang sangat menentukan terutama dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan kegiatan penyusunan data dan statistic ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Berikut dibawah ini program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 dan prakiraan maju maju Tahun 2016, seperti pada tabel 3.4 dibawah ini :





Tabel. 3.4  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2016  
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1.	Wajib								
1.13	Ketahanan Pangan								
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>								
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	27 Kab/Kota	70 Persen	500,000,000	APBD		70 persen	550,000,000
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>								
	Lingkungan bebas rawan pangan	Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan melalui proses pendampingan	27 Kab/Kota	180 kelompok	2,484,750,000	APBD		180 kelompok	2,733,225,000
	Lingkungan bebas rawan pangan	Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan melalui proses pendampingan	27 Kab/Kota	180 kelompok	4,500,000,000	APBD	HIBAH	180 kelompok	4,950,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Menurunnya konsumsi beras	27 Kab/Kota	1,5 Persen	1,715,000,000	APBD		1,5 Persen	1,886,500,000
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya kemampuan aparat ketahanan pangan tentang PPH	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	685,000,000	APBD		27 Kab/Kota	753,500,000
	Lomba Cipta Menu berbasis pangan local di Jawa Barat	Terimplementasikannya menu B2SA	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	400,000,000	APBD		27 Kab/Kota	440,000,000
	Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)	Terfasilitasinya sertifikasi Prima 3	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	2,355,000,000	APBD		27 Kab/Kota	2,590,500,000
	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan	27 Kab/Kota	150 Kelompok	1,955,000,000	APBD		150 Kelompok	2,150,500,000
	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Terbentuknya keluarga sadar gizi dan tertatanya lingkungan bebas rawan pangan	27 Kab/Kota	150 Kelompok	3,937,500,000	APBD	HIBAH	150 Kelompok	4,331,250,000
	Pengembangan desa mandiri pangan	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	1,000,000,000	APBD		27 Kab/Kota	1,100,000,000
	Pengembangan desa mandiri pangan	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	6,000,000,000	APBD	HIBAH	70 Desa	6,600,000,000
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	1,000,000,000	APBD		27 Kab/Kota	1,100,000,000
		Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	3,000,000,000	APBD			3,300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	2,000,000,000	APBD		27 Kab/Kota	2,200,000,000
	Analisis ketersediaan pangan di Jawa Barat	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	250,000,000	APBD		27 Kab/Kota	275,000,000
	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	5,000,000,000	APBD		27 Kab/Kota	5,500,000,000
	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	2,000,000,000	APBD	HIBAH	500 Kelompok	2,200,000,000
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	3,000,000,000	APBD		27 Kab/Kota	3,300,000,000
			27 Kab/Kota			APBD			-
	Pemantauan Harga dan Pasokan Harga Pangan	Tersedianya data dan informasi harga dan pasokan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	834,000,000	APBD		27 Kab/Kota	917,400,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	1,361,000,000	APBD		27 Kab/Kota	1,497,100,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	4,000,000,000	APBD	HIBAH	100 Kelompok	4,400,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	5,575,000,000	APBD		27 Kab/Kota	6,132,500,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)	Tertanganinya desa rawan pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	1,000,000,000	APBD	HIBAH	30 Gapoktan	1,100,000,000
	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat	Tercapainya Jawa Barat Bebas Rawan Pangan	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	3,481,545,000	APBD		27 Kab/Kota	3,829,699,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Pengembangan manajemen kelembagaan dan infrastruktur pangan	Meningkatnya pengetahuan aparat	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	2,596,000,000			27 Kab/Kota	2,855,600,000
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>								
	Sistem Informasi Ketahanan Pangan					APBD	Usulan Baru	1 Program	-
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur</b>								
	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Terpenuhinya kebutuhan operasional aparatur unit kerja OPD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat	Kota Bandung	76 Orang	500,000,000	APBD		76 Orang	550,000,000
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	Penyelenggaraan administrasi perkantoran BKPD	Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kota Bandung	1 Tahun	1,500,000,000	APBD		1 Tahun	1,650,000,000
	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan barang/bahan penunjang pekerjaan	Kota Bandung	76 Orang	2,000,000,000	APBD		76 Orang	2,200,000,000
	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur BKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat	Kota Bandung	76 Orang	1,500,000,000	APBD		76 Orang	1,650,000,000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BKPD	Tersusunnya data laporan capaian kinerja meliputi laporan Renja, LKIP, LPJ, LPPD, RKA, DPA/DPPA dan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan Tahunan	Kota Bandung	100 Persen	200,000,000	APBD		100 Persen	220,000,000
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah</b>								
	Penyusunan dan penyajian data statistic ketahanan pangan	Tersajikannya data dan informasi/ statistic ketahanan pangan	Kota Bandung	1 Dokumen	250,000,000	APBD		1 Dokumen	275,000,000
					66,579,795,000				73,237,774,500

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

---

Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan merupakan Tahun terakhir dari RPJMD. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2016 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2016. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2016 dengan efektif dan efisien.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan.
3. Pada awal Tahun anggaran 2016, setiap kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2014. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Keuangan.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2016 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi



Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Renja Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April Tahun 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah  
Provinsi Jawa Barat,

**Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630122 198603 2 004

